

TINDAK PIDANA KHUSUS

Penulis

Beby Suryani Fithri, SH, MH

Arie Kartika, SH., MH

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

TINDAK PIDANA KHUSUS

Penulis : Beby Suryani Fithri, SH, MH

Arie Kartika, SH., MH

Desain Cover : Beby Suryani Fithri, SH, MH

Edit Layout : Arie Kartika, SH., MH

Editor : Arie Kartika, SH., MH

ISBN:

Copyright@2025

Uk. UNESCO 15,5 cm x 23 cm hlm. 343

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Tindak Pidana Khusus* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik, regulasi, serta penegakan hukum tindak pidana khusus di Indonesia, baik dari segi teoritis maupun praktis.

Dalam era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi, tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, kejahatan siber, perdagangan orang, dan eksploitasi anak semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai Tindakan sangat penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang ingin mengetahui mekanisme penegakan hukum di Indonesia.

Buku ini membahas secara sistematis mulai dari konsep dasar tindak pidana khusus, kendala dalam penegakan hukum, strategi penanganan, hingga studi kasus yang relevan. Selain itu, buku ini juga menyoroti hubungan Tindakan dengan pembaharuan hukum pidana nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah dan praktis bagi para pembaca yang ingin memahami serta mendalami tindak pidana khusus di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	I
<u>DAFTAR ISI</u>	II
<u>SINOPSIS</u>	VII
<u>BAB I RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS</u>	1
A. DEFINISI TINDAK PIDANA KHUSUS	1
B. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS	4
C. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KHUSUS	7
D. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	15
E. TUJUAN TINDAK PIDANA KHUSUS	19
F. RANGKUMAN	25
G. SOAL LATIHAN	28
<u>BAB II LATAR BELAKANG SEJARAH TINDAK PIDANA KHUSUS</u>	29
A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA KHUSUS DI INDONESIA	29
B. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA KHUSUS	35
C. FAKTOR TINDAK PIDANA KHUSUS	41
D. KELEMAHAN KUHP SEBAGAI KODIFIKASI HUKUM PIDANA UMUM	45
E. DAMPAK TINDAK PIDANA KHUSUS	47
F. RANGKUMAN	50
G. SOAL LATIHAN	51
<u>BAB III SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI</u>	53
A. UNSUR-UNSUR SUBJEK HUKUM	53
B. SUBJEK HUKUM KORPORASI	57
C. ASAS-ASAS PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI	63
D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	70

E. RANGKUMAN	75
F. SOAL LATIHAN	77

BAB IV BENTUK PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA KHUSUS DI INDONESIA **79**

A. BENTUK PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM	79
B. MACAM-MACAM TINDAK PIDANA KHUSUS	84
C. FAKTOR PENYEBAB PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA KHUSUS	87
D. RANGKUMAN	89
E. SOAL LATIHAN	90

BAB V TINDAK PIDANA EKONOMI **92**

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKONOMI	92
B. PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI	93
C. BADAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKONOMI	100
D. KERANGKA HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA	104
E. PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA EKONOMI MELALUI KUHP BARU	109
F. RANGKUMAN	112
G. SOAL LATIHAN	114

BAB VI TINDAK PIDANA KORUPSI **115**

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	115
B. SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	117
C. KOMPONEN TINDAK PIDANA KORUPSI	122
D. FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI	126
E. RANGKUMAN	128
F. SOAL LATIHAN	130

BAB VII TINDAK PIDANA NARKOTIKA **131**

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	131
---------------------------------------	-----

B.	SUBYEK TINDAK PIDANA NARKOTIKA	135
C.	KATEGORISASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	140
D.	PENGGOLONGAN DELIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA	142
E.	SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009	147
F.	RANGKUMAN	152
G.	SOAL LATIHAN	153

BAB VIII TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG **154**

A.	PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	154
B.	TINDAK PIDANA <i>MONEY LAUNDERING</i>	156
C.	SISTEM PEMBUKTIAN DALAM UU No. 8 TAHUN 2010	159
D.	ALAT BUKTI MENURUT PASAL 73 UU No. 8 TAHUN 2010	162
E.	STRATEGI NASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	166
F.	PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	169
G.	RANGKUMAN	171
H.	SOAL LATIHAN	173

BAB IX TINDAK PIDANA TERORISME **175**

A.	PENGERTIAN TINDAK PIDANA TERORISME	175
B.	JENIS-JENIS TERORISME	177
C.	KRITERIA TERORISME	180
D.	PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA TERORISME	183
E.	RANGKUMAN	191
F.	SOAL LATIHAN	193

BAB X TINDAK INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK **195**

A.	PENGERTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	195
B.	UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	201

C.	ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE	204
D.	RANGKUMAN	208
E.	SOAL LATIHAN	211

BAB XI TINDAK PIDANA ANAK **212**

A.	PENGERTIAN TINDAK PIDANA ANAK	212
B.	MACAM-MACAM TINDAK PIDANA ANAK	214
C.	FAKTOR PENYEBAB TERJADIMYA TINDAK PIDANA PADA ANAK	217
D.	UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK	222
E.	SISTEM PEMIDANAAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	224
F.	RANGKUMAN	229
G.	SOAL LATIHAN	233

BAB XII TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) **234**

A.	PENGERTIAN KEKERAN DALAM RUMAH TANGGA	234
B.	FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KDRT	236
C.	BENTUK KDRT	244
D.	PERATURAN PERLINDUNGAN KORBAN KDRT	249
E.	UPAYA PENANGANAN KDRT	254
F.	RANGKUMAN	261
G.	SOAL LATIHAN	264

BAB XIII TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) **265**

A.	PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	265
B.	BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	269
C.	PENCEGAHAN TERJADINYA <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	276
D.	KETENTUAN PIDANA MATERIL TINDAK PIDANA TRAFFICKING	280
E.	RANGKUMAN	287
F.	SOAL LATIHAN	291

BAB XIV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS **293**

A.	KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	293
B.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	295
C.	KEBERADAAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL	298
D.	RANGKUMAN	302
E.	SOAL LATIHAN	305

BAB XV EKSISTENSI TIPISUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA **306**

A.	MAKNA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	306
B.	PENTINGNYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA	310
C.	STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KHUSUS	315
D.	RANGKUMAN	320
E.	SOAL LATIHAN	322

DAFTAR PUSTAKA **323**

SINOPSIS

Buku *Tindak Pidana Khusus* ini disusun berdasarkan RPS pada mata kuliah Tindak Pidana Khusus, yang diwajibkan bagi mahasiswa pada Program Ilmu Hukum Jurusan Hukum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban 2 sks. Mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait konsep, sejarah, faktor penyebab, dampak, serta penegakan hukum tindak pidana khusus di Indonesia.

Dengan capaian pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan ruang lingkup tindak pidana khusus, termasuk definisi, dasar hukum, dan tujuan penerapannya.
2. Mampu menjelaskan sejarah tindak pidana khusus serta perkembangan Tipisus di Indonesia.
3. Mampu mengidentifikasi faktor penyebab tindak pidana khusus, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.
4. Mampu menjelaskan dampak tindak pidana khusus terhadap masyarakat, negara, dan sistem hukum.
5. Mampu mendeskripsikan beberapa tindak pidana khusus di Indonesia, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, kejahatan siber, dan eksploitasi anak.
6. Mampu menjelaskan penegakan hukum tindak pidana khusus, mencakup kendala, strategi, koordinasi antar lembaga, serta perlindungan korban.
7. Mampu menjelaskan eksistensi Tipisus dalam pembaharuan hukum pidana, termasuk integrasi dalam RKUHP, perlindungan hak korban, dan prinsip keadilan sosial.

Buku ini diharapkan menjadi panduan ilmiah yang komprehensif untuk memahami tindak pidana khusus di Indonesia serta menjadi referensi penting bagi studi hukum pidana modern.

